

**PENGARUH MEKANISME *CORPORATE*
GOVERNANCE TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PERBANKAN**

(Studi Kasus pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia Periode 2010-2013)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

TYAS RUKMI KEN HUTAMI

NIM. 12030110120109

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2014**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Tyas Rukmi Ken Hutami
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110120109
Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH MEKANISME
CORPORATE GOVERNANCE
TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PERBANKAN**
(Studi Kasus pada Bank
Pembangunan Daerah di Indonesia
Periode 2010-2013)

Dosen Pembimbing : Marsono, S.E.,M.Adv.Acc., Akt

Semarang, 7 Oktober 2014
Dosen Pembimbing,

(Marsono, S.E.,M.Adv.Acc., Akt)
NIP. 19711225 199903 1003

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Tyas Rukmi Ken Hutami
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110120109
Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH MEKANISME
CORPORATE GOVERNANCE
TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERBANKAN**
(Studi Kasus pada Bank Pembangunan Daerah
di Indonesia Periode 2010-2013)

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 16 Oktober 2014

Tim Penguji

1. Marsono, S.E., M.Adv. Acc., Akt. ()
2. Dr.H. Raharja, M.Si., Akt. ()
3. Dul Muid, S.E., M.Si., Akt. ()

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Tyas Rukmi Ken Hutami, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi Kasus pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia Periode 2010-2013)** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 7 Oktober 2014

Yang membuat pernyataan,

(Tyas Rukmi Ken Hutami)

NIM: 12030110120109

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (QS. Ar Ra'd 13:11)

Gantungkan cita-cita mu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Ir. Soekarno

God always answer your request, maybe not always with a yes but always with the best. Anonim

PERSEMBAHAN:

1. Kedua orang tua, Ibu dan Bapakku tersayang, terima kasih atas kasih sayang dan dorongannya.
2. Adikku, Tyas Herlintang Prihatmanti
3. Almamater Universitas Diponegoro Semarang.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor mekanisme *corporate governance* yang mempengaruhi kinerja keuangan perbankan pada Bank Pembangunan Daerah. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, komite pemantau risiko, komisaris independen, kualitas audit, pemegang saham pengendali, dan *whistleblowing system* sedangkan variabel dependennya adalah kinerja keuangan perbankan yang diproksi dengan CAR, NIM dan LDR. Ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol.

Populasi penelitian ini adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia tahun 2010-2013. Data diperoleh dari laporan tahunan bank (*annual report*) periode 2010-2013 yang didapat dari website masing-masing sampel dan website bursa efek Indonesia. Metode analisis yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah regresi linear berganda. Metode yang digunakan untuk menentukan sampel adalah *purposive sampling*, dimana dari metode ini didapatkan sampel sebanyak 80 sampel bank BPD.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksi dengan CAR, tetapi dewan komisaris memiliki hubungan positif tidak signifikan terhadap kinerja yang diproksi dengan NIM dan LDR (2) dewan direksi memiliki hubungan negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan (3) komite audit memiliki hubungan negatif tidak signifikan terhadap kinerja (4) komite pemantau risiko memiliki hubungan positif terhadap kinerja keuangan yang diproksi dengan NIM dengan LDR dan negatif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja yang diproksi dengan CAR (5) komisaris independen memiliki hubungan positif dengan kinerja keuangan yang diproksi dengan CAR dan negatif dengan kinerja keuangan yang diproksi dengan NIM dan LDR (6) kualitas audit memiliki hubungan positif dengan kinerja keuangan yang diproksi dengan CAR dan negatif dengan kinerja keuangan yang diproksi dengan NIM dan LDR (7) pemegang saham pengendali memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap kinerja yang diproksi dengan NIM dan LDR tetapi berpengaruh negatif terhadap kinerja yang diproksi dengan CAR (8) *whistleblowing system* memiliki hubungan positif terhadap kinerja yang diproksi dengan CAR dan LDR tetapi negatif terhadap kinerja yang diproksi dengan NIM

Kata kunci: *corporate governance*, kinerja perbankan, dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, komite pemantau risiko, komisaris independen, kualitas audit, pemegang saham pengendali, *whistleblowing system*, ukuran perusahaan

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors of corporate governance mechanism that affect the corporate financial performance in Regional Development Bank. Independent variables used in this study are board of commissioner, board of director, audit committee, risk committee, audit quality, blockholder ownership and whistleblowing system. Size is used as a control variable.

The population of this research is the Regional Development Bank (BPD) in periode 2010-2013. Data obtained from the bank's annual report in 2010-2013 that obtained from the website of each sample and the Indonesian stock exchange's website. The method of analysis used to analyze the effect of independent variables on the dependent variable is the linear regression. The method used to determine the sample was purposive sampling, which of these methods obtained a sample of 80 Regional Development Bank.

The results of this study indicate that (1) the commissioners had significant effect on financial performance proxied by CAR, but commissioners did not have the significant positive relationship to performance is proxied by NIM and LDR (2) The board of directors has no significant negative relationship to financial performance (3) The audit committee has no significant negative relationship on performance (4) risk monitoring committee was positively related to financial performance proxied by NIM with LDR and negative but not significant to the performance of the proxy with CAR (5) independent commissioners have the positive relationship with performance financial proxied by CAR and negative financial performance proxied by NIM and LDR (6) audit quality have the positive relationship with financial performance proxied by CAR and negative financial performance proxied by NIM and LDR (7) controlling shareholder has a significant positive relationship to performance is proxied by NIM and LDR but negatively affect the performance of the proxy with the CAR (8) whistleblowing system has a positive relationship to performance is proxied by CAR and LDR but negatively to performance proxied by NIM.

Keywords: corporate governance, bank performance, board of commissioners, board of directors, audit committee, risk monitoring committee, an independent commissioner, audit quality, controlling shareholder, whistleblowing system, company size.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PENGARUH MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN (Studi Kasus pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia Periode 2010-2013)**”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, petunjuk, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof.Drs.H. Mohamad Nasir, M.Si., Akt, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof.Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
3. Marsono, S.E.,M.Adv.Acc., Akt selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan saran, bimbingan, serta pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt selaku dosen wali yang telah membimbing penulis selama menempuh studi di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
5. Seluruh dosen dan staf karyawan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu dan membantu selama proses perkuliahan.
6. Kedua orang tua serta adik saya yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materi, semangat dan doa.

7. Eko Aji Surdiyansah yang selalu memberikan dukungan dan mewarnai hari penulis, Ipung yang selalu membantu penulis dan Pepi serta Agung yang selalu memberikan semangat pada penulis.
8. Satu Jiwa (Rofikoh, Fitri, Sabtari, Tya, dan Pretty), Novia, Rizkia, Lita dan teman-teman kuliah di FEB UNDIP Akuntansi R1 2010 yang memberikan semangat dalam proses skripsi dan pengalaman yang mewarnai hari-hari penulis.
9. Anak kos RSJ 23A (Kak Jingga, Kak Eka, Kak Fely, Kak Kiki, Mbak Achi, Mbak Dita, Kak Pita, Kak Cindol, Briptu, Acha, Supa, Pipin, Eci, Evi, Dinda, Nida, Dian, Sarah, Rara, Sari dan Cami) terima kasih telah menjadi keluarga kedua bagi penulis.
10. Teman-teman KKN *The Jumoyo's* (Andra, Ari, Aufan, Bondan, Ferandi, Gustin, Haris, Lingga, Veve, Vina, dan Zainab) yang telah memberikan pengalaman, ilmu dan dukungan.
11. Satu kelompok anak bimbingan Pak Marsono yang memberikan info-info mengenai jadwal bimbingan.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat demi penulisan yang lebih baik di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Semarang, 7 Oktober 2014

Penulis

Tyas Rukmi Ken Hutami

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1.3.1 Tujuan	10
1.3.2 Kegunaan Penelitian	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II TELAAH PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	12

2.1.1	Teori Keagenan.....	12
2.2	<i>Corporate Governance</i>	13
2.2.1	Definisi <i>Corporate Governance</i>	13
2.2.2	Prinsip <i>Good Corporate Governane</i>	14
2.2.3	Manfaat dan Tujuan <i>Corporate Governance</i>	15
2.2.4	Mekanisme <i>Corporate Governance</i>	16
2.3	Kinerja Perbankan	17
2.4	Penelitian Terdahulu	19
2.5	Kerangka Pemikiran	26
2.6	Perumusan Hipotesis	28
2.6.1	Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan Perbankan ..	28
2.6.2	Pengaruh Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan Perbankan	29
2.6.3	Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Perbankan	30
2.6.4	Pengaruh Komite Pemantau Risiko terhadap Kinerja Keuangan Perbankan	30
2.6.5	Pengaruh Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan Perbankan	31
2.6.6	Pengaruh Kualitas Audit terhadap Kinerja Keuangan Perbankan.....	32
2.6.7	Pengaruh Pemegang Saham Pengendali terhadap Kinerja Keuangan Perbankan	34
2.6.8	Pengaruh <i>Whistleblowing System</i> terhadap Kinerja Keuangan Perbankan	35

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	37
3.1.1	Variabel Independen.....	37
3.1.2	Variabel Dependen.....	40
3.1.3	Variabel Kontrol.....	41
3.2	Populasi dan Sampel.....	41
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	42
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	42
3.5	Metode Analisis.....	42
3.5.1	Analisis Deskriptif.....	43
3.5.2	Uji Asumsi Klasik.....	43
3.5.2.1	Uji Normalitas.....	43
3.5.2.2	Uji Multikolinearitas.....	44
3.5.2.3	Uji Autokorelasi.....	44
3.5.2.4	Uji Heterokedastisitas.....	46
3.5.3	Regresi Linear berganda.....	47
3.5.4	Pengujian Hipotesis.....	47
3.5.4.1	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	48
3.5.3.2	Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	48
3.5.3.3	Koefisien Determinasi (R^2).....	48

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	50
4.2	Analisis Data.....	51

4.2.1	Statistik Deskriptif.....	51
4.2.2	Uji Asumsi Klasik.....	56
4.2.2.1	Uji Normalitas.....	56
4.2.2.2	Uji Heterokedastisitas.....	62
4.2.2.3	Uji Multikolonieritas.....	68
4.2.2.4	Uji Autokorelasi.....	70
4.3	Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F).....	77
4.4	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	80
4.5	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	81
4.6	Hipotesis.....	84
4.7	Interpretasi Hasil.....	90
4.7.1	Pengaruh dewan komisaris terhadap kinerja keuangan perbankan.....	90
4.7.2	Pengaruh dewan direksi terhadap kinerja keuangan perbankan.....	90
4.7.3	Pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan perbankan.....	91
4.7.4	Pengaruh komite pemantau risiko terhadap kinerja keuangan perbankan.....	91
4.7.5	Pengaruh komisaris independen terhadap kinerja keuangan perbankan.....	92
4.7.6	Pengaruh kualitas audit terhadap kinerja keuangan perbankan.....	93
4.7.7	Pengaruh pemegang saham penendali terhadap kinerja keuangan perbankan.....	94
4.7.8	Pengaruh <i>whistleblowing system</i> terhadap kinerja keuangan perbankan.....	94

4.7.9 Pengaruh ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol terhadap kinerja keuangan perbankan.....	95
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	97
5.2 Keterbatasan	102
5.3 Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	104
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	109

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian-Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3.1 Pengambilan Keputusan Autokorelasi	45
Tabel 4.1 Proses Seleksi Sampel Penelitian.....	51
Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	52
Tabel 4.3 Hasil Uji Deskriptif Frekuensi	55
Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas: Kolmogorov-Smirnov.....	61
Tabel 4.5 Hasil Uji Heterokedastisitas: Uji Park Model 1.....	65
Tabel 4.6 Hasil Uji Heterokedastisitas: Uji Park Model 1 Semi Log	66
Tabel 4.7 Hasil Uji Heterokedastisitas: Uji Park Model 2.....	67
Tabel 4.8 Hasil Uji Heterokedastisitas: Uji Park Model 3.....	67
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolonieritas: Model 1	68
Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolonieritas: Model 2	69
Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolonieritas: Model 3.....	70
Tabel 4.12 Hasil Uji Autokorelasi: Durbin Watson Model 1	71
Tabel 4.13 Hasil Uji Autokorelasi: Run Test Model 1	71
Tabel 4.14 Hasil Uji Autokorelasi: Durbin Watson Model 2	72
Tabel 4.15 Hasil Uji Autokorelasi: Run Test Model 2	73
Tabel 4.16 Hasil Uji Autokorelasi: Durbin Watson Model 3	73
Tabel 4.17 Hasil Uji Autokorelasi: Run Test Model 3	74
Tabel 4.18 Hasil Uji Autokorelasi: Durbin Watson Model 3 Setelah Transformasi	76

Tabel 4.19 Hasil Uji Autokorelasi: Run Test Model 3 Setelah Transformasi	76
Tabel 4.20 Hasil Uji Statistik F Model 1	78
Tabel 4.21 Hasil Uji Statistik F Model 1 Model 2	78
Tabel 4.22 Hasil Uji Statistik F Model 1 Model 3	79
Tabel 4.23 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) Model 1	80
Tabel 4.24 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) Model 2	80
Tabel 4.25 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) Model 3	81
Tabel 4.26 Hasil Uji Statistik t Model 1	82
Tabel 4.27 Hasil Uji Statistik t Model 2	82
Tabel 4.28 Hasil Uji Statistik t Model 3	83
Tabel 4.29 Ringkasan Hasil Hipotesis Penelitian	88

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran Penelitian	27
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas : Histogram Model 1	57
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas : Grafik Normal P-P Plot Model 1	57
Gambar 4.3 Hasil Uji Normalitas : Histogram Model 2	58
Gambar 4.4 Hasil Uji Normalitas : Grafik Normal P-P Plot Model 2	58
Gambar 4.5 Hasil Uji Normalitas : Histogram Model 3	59
Gambar 4.6 Hasil Uji Normalitas : Grafik Normal P-P Plot Model 3	59
Gambar 4.7 Hasil Uji Heterokedastisitas: Uji Scatterplot Model 1	62
Gambar 4.8 Hasil Uji Heterokedastisitas: Uji Scatterplot Model 2	63
Gambar 4.9 Hasil Uji Heterokedastisitas: Uji Scatterplot Model 3	64

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A	110
Lampiran B.....	111
Lampiran C.....	120

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai pihak dalam perusahaan yang menentukan antara arah dan kinerja perusahaan (Monks & Minow, 2001). Penerapan *corporate governance* yang baik atau yang dikenal dengan *good corporate governance* dapat membantu *stakeholder* dalam mengetahui kondisi perusahaan melalui pengungkapan kinerja keuangan yang akurat, tepat waktu dan transparan.

Kelangsungan hidup suatu perusahaan tergantung pada tata kelola perusahaannya. Dalam banyak kasus, terdapat kasus-kasus yang menunjukkan pentingnya penerapan *good corporate governance* dalam perusahaan. Skandal keuangan yang terjadi pada Enron, Tyco, Worldcom, Merck, Global Crossing dan mayoritas perusahaan lain di Amerika Serikat meningkatkan kajian mengenai *corporate governance* (cornett, dkk 2006 dalam Hastuti 2011). *Corporate Governance* di Indonesia dirasa sangat diperlukan setelah terjadinya krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1998. Perusahaan pada saat itu dinilai tidak transparan dalam menyajikan laporan keuangan dan terkesan dimanipulasi. Selain itu, jauh sesudah krisis tahun 1998 Indonesia masih terjadi beberapa kasus manipulasi laporan keuangan seperti PT. Lippo dan PT. Kimia Farma. Peristiwa-peristiwa tersebut dipandang akibat lemahnya mutu tata kelola perusahaan sehingga banyak perusahaan mengalami kebangkrutan.

Bukti menunjukkan lemahnya praktik *corporate governance* di Indonesia mengarah ada defisiensi pembuatan keputusan dalam perusahaan dan tindakan perusahaan (Alijoyo dkk., 2004 dalam Hastuti, 2011). *Corporate governance* merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep *corporate governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan (Hastuti, 2011).

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh James D. Wolfensohn, President of the World Bank, c. (1999), terdapat dua teori utama yang terkait dengan Corporate Governance adalah *stewardship theory* dan *agency theory*. *Stewardship theory* dibangun diatas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab memiliki, integrasi, dan kejujuran terhadap pihak lain. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun *shareholders* pada khususnya. Sedangkan *agency theory* memandang bahwa manajemen tidak dapat dipercaya untuk bertindak sebaik-baiknya untuk kepentingan publik maupun *shareholders*. *Agency theory* menyatakan permasalahan *agency* muncul ketika pengelolaan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikannya. Pemilik sebagai pemasok modal perusahaan mendelegasikan wewenang atas pengelolaan perusahaannya kepada manajer. Hal ini dapat berakibat terjadi ketimpangan informasi (asimetri informasi) antara manajer dan

shareholder. Manajer sebagai eksekutif yang menjalankan perusahaan mempunyai informasi yang lebih rinci mengenai perusahaan daripada *shareholders*. Dengan informasi yang dimilikinya manajer dapat bertindak untuk menguntungkan dirinya sendiri dan mengesampingkan kepentingan *shareholders* serta kinerja perusahaan. Adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara manajer dan *shareholders* dapat menurunkan kinerja perusahaan dan menghilangkan minat investor untuk berinvestasi karena hilangnya kepercayaan investor pada kemampuan perusahaan terhadap return dari investasi yang telah mereka tanam.

Penerapan konsep *good corporate governance* juga sangat penting bagi sektor perbankan. Sektor perbankan merupakan industri jasa keuangan yang berperan penting dalam perkembangan perekonomian negara, terlebih lagi perbankan mempunyai regulasi yang lebih ketat bila dibandingkan dengan sektor industri yang lain. Perbankan harus memenuhi kondisi CAR minimum dan dinyatakan sehat oleh Bank Indonesia yang ditentukan dari laporan keuangannya. Untuk menciptakan industri perbankan yang sehat, kuat dan dapat dipercaya oleh masyarakat maka perbankan harus dikelola secara profesional dalam hal sumber daya manusia maupun manajemennya. Deregulasi perbankan pada tahun 1988 secara tidak langsung mempunyai peran terhadap terjadinya krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada tahun 1998. Krisis tersebut telah menghancurkan perekonomian negara termasuk sektor perbankan yang mengakibatkan menurunnya kinerja keuangan perbankan.

Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai bank konvensional wajib menerapkan *good corporate governance*. Kepemilikan BPD didominasi oleh pemerintah daerah, bisa pemerintah provinsi maupun kabupaten. BPD merupakan bank yang memiliki wilayah operasional di tingkat regional, maka dari itu BPD lebih mengerti mengenai potensi-potensi yang ada di daerah sehingga pertumbuhan ekonomi lingkup regional banyak dipengaruhi oleh kinerja BPD. Menurut Darwanto (2012) BPD mempunyai beberapa permasalahan meliputi produk dan layanan terbatas, rendahnya SDM, kurangnya kemitraan dan kurangnya modal. Maka dari itu, dengan penerapan konsep *good corporate governance* dalam BPD diharapkan dapat meminimalkan resiko dan mengatasi masalah-masalah pada BPD serta dapat meningkatkan kinerja BPD.

Peraturan terkait penerapan *corporate governance* di Indonesia dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI), Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) yang mulai tahun 2012 dilebur menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun Keputusan Menteri BUMN. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/27/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum serta Surat Edaran Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance*. Pada tahun 2012, KNKG menerbitkan Prinsip Dasar dan Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia. Keputusan Ketua Badan Pasar Modal Nomor Kep-06/PM/2000 tentang Perubahan Peraturan Nomor VIII.G.7

tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan bahwa untuk meningkatkan kualitas keterbukaan laporan keuangan Emiten dan Perusahaan Publik dan mendorong terciptanya *good corporate governance*, ketentuan mengenai Pedoman Penyajian Laporan Keuangan perlu disesuaikan dengan perkembangan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). (Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002) tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja BUMN, pelaksanaan prinsip *good corporate governance* perlu lebih dioptimalkan. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis pakta *Governance* yang berisi komitmen untuk meningkatkan kualitas *Good Corporate Governance* (GCG) pada industri jasa keuangan. OJK juga bekerja sama dengan *International Finance Corporation* (IFC) mengembangkan dan meluncurkan peta jalan (*roadmap*) dan buku panduan *corporate governance*.

Berghe dan Ridder (1999) dalam Hastuti (2011) menyatakan bahwa menghubungkan kinerja perusahaan dengan *good corporate governance* tidak mudah dilakukan. Beberapa penelitian menunjukkan tidak ada hubungan *corporate governance* dengan kinerja perusahaan, misalnya penelitian Daily dkk. (1998) dan hasil survey CBI, Deloitte dan Touche (1996) dalam Darmawati (2004). Demikian juga dengan Young (2003) yang menganalisis beberapa penelitian yang menghubungkan *corporate governance* dengan kinerja perusahaan. Di lain pihak, berdasarkan beberapa hasil penelitian, Berghe dan Ridder menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai *poor performance* disebabkan oleh *poor governance*. Core et al (1999) menyatakan bahwa

perusahaan di AS dengan struktur *corporate governance* yang lemah kinerjanya tidak lebih baik daripada perusahaan yang memiliki struktur *corporate governance* yang baik. `

Penelitian mengenai ukuran dewan komisaris memiliki hasil yang beragam. Beasley (1996) menemukan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris maka semakin besar kecurangan dalam pelaporan keuangan. Sekaredi (2011) menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sementara Hardikasari (2011) menyatakan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Ukuran dewan direksi juga memiliki hasil penelitian yang beragam, Eisenberg et al. (1998) menyatakan bahwa ada hubungan yang negatif antara ukuran dewan dengan kinerja perusahaan, dengan menggunakan sampel perusahaan di Finlandia. Sedangkan Dalton et al. (1999) menyatakan adanya hubungan positif antara ukuran dewan direksi dengan kinerja perusahaan.

Berkaitan dengan komite audit, ada berbagai penelitian. Sam'ani (2008) mengatakan bahwa komite audit mempunyai peran yang penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan. Sedangkan penelitian Sekaredi dan Adiwibowo (2011) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Penerapan manajemen risiko dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum No. 11/25/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/23/DPNP

tanggal 25 Oktober 2011. Maryatini (2006) menemukan bahwa struktur resiko keuangan dan perataan laba berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Penelitian mengenai independensi dewan terhadap kinerja perusahaan ternyata masih beragam. Ada penelitian yang menyatakan bahwa tingginya proporsi dewan independen berhubungan positif dengan kinerja perusahaan (Yermack, 1996; Daily & Dalton, 1993; Stearn & Mizruchi, 1993) dalam Hastuti (2011). Sedangkan penelitian yang lain menyatakan dewan independen berhubungan negatif dengan kinerja (Baysinger, Kosnik & Turk, 1991; Goodstein & Boeker, 1991) dalam Hastuti (2011). Independensi dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, namun belum berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan (Lastanti, 2004). Sementara variabel kepemilikan institusional dan tingkat konsentrasi kepemilikan belum berpengaruh secara signifikan baik terhadap nilai perusahaan maupun kinerja keuangan (Lastanti, 2004).

Menurut Arifin (2005) auditor eksternal memiliki peranan sangat penting (*crucial*) karena auditor bertugas memverifikasi kewajaran berbagai informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Beberapa perusahaan memilih untuk menggunakan auditor eksternal yang berstandarisasi internasional untuk menilai kualitas auditnya guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemegang saham. Penelitian mengenai kualitas audit juga dilakukan oleh Meutia (2004) yang menyimpulkan bahwa perusahaan yang memakai kantor akuntan publik yang lebih besar (*Big 4*), kualitas audit yang dihasilkan juga lebih baik.

Penelitian mengenai pemegang saham pengendali pernah dilakukan oleh Shleifer dan Vishny (1986) dalam Lastanti (2004) menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara konsentrasi kepemilikan dengan nilai perusahaan, Pemegang saham pengendali (*large shareholders*) dapat mengurangi *freerider* yang merupakan masalah bagi investor kecil sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Whistleblowing system digunakan untuk mendeteksi dan mengungkap *wrongdoing* yang terjadi di dalam sebuah organisasi. Di Indonesia sudah ada Pedoman Sistem Pelaporan dan Pelanggaran (SPP) atau *Whistleblowing System* (WBS) yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada 10 November 2008. Miceli dan Near (2002) menyatakan bahwa kebanyakan *whistleblower* pertama kali mengungkapkan penemuannya kepada internal perusahaan sebelum melaporkannya kepada publik. Penelitian yang mengaitkan *whistleblowing* dengan akuntansi manajemen masih sedikit (Putri, 2012).

Penelitian ini memakai konsep indikator mekanisme *corporate governance* yang terdiri dari: dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, komite pemantau risiko, komisaris independen, kualitas audit eksternal, pemegang saham pengendali dan keberadaan *whistleblowing system* terhadap kinerja keuangan pada industri perbankan (BPD) di Indonesia dimana diproksi dengan *Risk Based Bank Rating* (RBBR) yang meliputi permodalan (CAR), *Good Corporate Governance*, rentabilitas (NIM), dan profil risiko (LDR) sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji

variabel *corporate governance* yang telah disesuaikan dengan kondisi lingkungan bisnis dan peraturan di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka skripsi ini diberi judul “ **PENGARUH MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN (Studi Kasus pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia Tahun 2010-2013)**”

1.2 Rumusan Masalah

Perbankan merupakan perusahaan finansial yang keberadaannya sangat vital dalam perekonomian sebuah negara. Hampir seluruh transaksi finansial melibatkan perbankan sebagai lembaga untuk lalu lintas transaksi. Sebagai lembaga finansial, perbankan mempunyai regulasi yang lebih ketat dibandingkan perusahaan lainnya. Regulasi perbankan di Indonesia sebelumnya diatur oleh Bank Sentral yaitu Bank Indonesia. Tetapi sejak tanggal 31 Desember 2013 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fungsi pengaturan dan pengawasan bank dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip GCG. (Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP/2013). Penerapan *Good Corporate Governance* pada perbankan menjadi salah satu faktor

acuan dalam menilai sehat atau tidaknya perbankan dan tingkat kepercayaan masyarakat pada bank tersebut.

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini akan menganalisis pengaruh mekanisme *corporate governance* yang meliputi dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, komite pemantau risiko, komisaris independen, kualitas audit, pemegang saham pengendali dan *whistleblowing system* terhadap kinerja keuangan perbankan (BPD) yang diproksi dari segi permodalan menggunakan CAR, rentabilitas menggunakan NIM dan profil risiko menggunakan LDR.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh penerapan *Corporate Governance* yang terdiri dari indikator: ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, ukuran komite pemantau risiko, komisaris independen, kualitas audit eksternal, pemegang saham pengendali, dan keberadaan *whistleblowing system* terhadap kinerja keuangan perbankan di Indonesia.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritik

Sebagai bahan masukan, pertimbangan dan sumber kepustakaan bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian tentang *Corporate Governance* di perbankan.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan pertimbangan investor jika hendak berinvestasi pada perusahaan atau perbankan yang telah menerapkan *Good Corporate Governance*. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi perusahaan khususnya perbankan dalam menerapkan *Good Corporate Governance*.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan akan menguraikan secara garis besar isi dari setiap bab yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN: Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA: Bab ini membahas mengenai teori-teori yang menjadi dasar acuan teori dan untuk memperkuat penelitian yang akan dilakukan. Mencakup landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN: Bab ini memaparkan tentang variabel penelitian dan definisi operasional penelitian, penentuan sampel penelitian, jenis dan sumber data, serta metode pengumpulan data dan metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN: Bab ini merupakan isi pokok dari penelitian yang berisi deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan sehingga dapat diketahui hasil analisis yang diteliti mengenai hasil pengujian hipotesis.

BAB V PENUTUP: Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian serta saran bagi penelitian berikutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi membahas adanya hubungan kepemilikan yang terpisah dengan agen. Hubungan keagenan tersebut merupakan kontrak antara pemilik dan manajemen (Jensen dan Meckling, 1976). Teori ini mengacu pada pemilik (*principal*) sebagai penyedia modal yang mendelegasikan kewenangan untuk mengurus perusahaan kepada manajer (*agent*). Pemilik berharap manajer bekerja semaksimal mungkin untuk kemajuan perusahaan. Sedangkan manajer berupaya untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Jika keduanya memaksimalkan peran yang mereka miliki (*utility maximizier*) maka akan terjadi konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara pemilik dengan manajer. Menurut Eisenhardt (1989) ada tiga asumsi dasar sifat manusia yaitu :

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self-interest*)
2. Manusia mempunyai daya pikir terbatas mengenai persepsi di masa mendatang (*bounded rationally*)
3. Manusia selalu menghindari resiko (*risk adverse*)

Manajer tidak selalu mengikuti keinginan pemilik karena adanya kepentingan pribadi dan psikologis manajer . Selain itu, manajer memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pemilik (asimetri informasi), hal ini dapat mengakibatkan manajer untuk berbuat kecurangan seperti manajemen laba untuk meningkatkan

kekayaan pribadi. Untuk mengontrol agar agen selalu bertindak sesuai dengan keinginan pemilik, maka pemilik harus mengeluarkan *agency cost* yang dapat berupa gaji atau insentif lainnya. Penerapan *corporate governance* dapat menjadi control pemilik pada manajer yang bertujuan untuk meminimalkan konflik kepentingan antara pemilik dan manajer.

2.2 Corporate Governance

2.2.1 Definisi Corporate Governance

Menurut *Forum For Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

The Organization for Economic Corporation and Development (1999) mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut :

“The system by which business corporations are directed and control. The corporate governance structure specifies the distribution of right and responsibilities among different participant in the corporation, suc as the board, the managers, shareholders and other stakeholders, and spells out the rule ang procedure for making decision on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance.”

Sedangkan dalam buku Solomon (2008), *corporate governance* merupakan sistem *check and balance*, baik internal maupun eksternal perusahaan yang memastikan bahwa perusahaan melaksanakan akuntabilitas kepada semua

pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan secara sosial bertanggung jawab disemua aktivitas bisnisnya.

Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). (Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum).

2.2.2 Prinsip *Good Corporate Governance*

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP/2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, maka *Good Corporate Governance* pada perbankan mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Transparansi (*transparency*)

Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif

3. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat

4. Independensi (*independency*)

Pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun

5. Kewajaran (*fairness*)

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.3 Manfaat dan Tujuan *Corporate Governance*

Esensi *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap *shareholder* dan pemakai kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku (Tri Gunarsih, 2003 dalam Hardikasari 2011). Disamping hal tersebut *corporate governance* juga mempunyai manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dengan lebih baik, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan *corporate value*.
3. Mengurangi *agency cost*, yaitu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
4. Meningkatkan nilai saham perusahaan sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan kepada publik lebih luas dalam jangka panjang.

5. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Sedangkan tujuan *corporate governance* adalah sebagai berikut :

1. Melindungi hak dan kepentingan *stakeholder* pemegang saham maupun non pemegang saham.
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dewan pengurus dan manajemen perusahaan.
5. Meningkatkan mutu hubungan dewan pengurus atau *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.

2.2.4 Mekanisme *Corporate Governance*

Mekanisme merupakan suatu aturan atau prosedur untuk melaksanakan kegiatan agar berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan. Mekanisme *corporate governance* sendiri merupakan aturan atau prosedur yang dilaksanakan untuk mengendalikan perusahaan guna memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan *stakeholder* secara berkesinambungan dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Mekanisme *corporate governance* diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem *governance* dalam sebuah organisasi (Ujiyanto, 2005) dalam (Arifin, 2010). Penerapan mekanisme yang efektif dan konsisten diyakini dapat mengurangi *agency cost*, meningkatkan nilai saham di mata public dalam jangka panjang.

Menurut Iskandar & Chamlaio (2000) dalam Lastanti (2004) dalam penerapan *corporate governance* terdapat dua mekanisme, yaitu mekanisme

internal dan mekanisme eksternal. Mekanisme internal merupakan cara mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi, komite audit. Sedangkan mekanisme eksternal merupakan cara mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses eksternal yang ada di luar perusahaan baik ekonomi, hukum, dan sosial untuk mengontrol jalannya perusahaan agar sesuai dengan keinginan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Penelitian ini membahas tentang mekanisme internal *corporate governance* yang meliputi dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, komite pemantau risiko, komisaris independen, kualitas audit, pemegang saham pengendali, dan penerapan *whistleblowing system* pada perbankan.

2.3 Kinerja Perbankan

Kinerja merupakan suatu tindakan untuk mencapai tujuan yang diukur dengan membandingkan pada standar tertentu. Tujuan dari dilakukannya pengukuran kinerja perbankan tidak jauh berbeda dengan kinerja perusahaan. Pengukuran kinerja dibutuhkan untuk menentukan strategi-strategi yang tepat dalam rangka mempertahankan kelangsungan dan mencapai tujuan perusahaan di masa depan. Pengukuran kinerja perusahaan terbagi menjadi dua yaitu pengukuran kinerja keuangan dan pengukuran kinerja non keuangan. Kinerja keuangan diukur dengan satuan mata uang. Sedangkan kinerja non keuangan diukur dengan indikator non keuangan.

Penilaian pada perbankan merupakan suatu faktor yang sangat penting bagi *stakeholders* seperti manajemen bank, nasabah, mitra bisnis, investor dan pemerintah. Bank yang dapat menjaga kinerjanya dengan baik terutama tingkat profitabilitasnya yang tinggi dan mampu membagikan deviden dengan baik serta prospek usahanya dapat selalu berkembang dan dapat memenuhi ketentuan *prudential banking regulation* dengan baik, maka ada kemungkinan nilai sahamnya dan jumlah dana pihak ketiga akan naik. Kenaikan nilai saham dan jumlah dana pihak ketiga ini merupakan salah satu indikator naiknya kepercayaan masyarakat kepada bank yang bersangkutan. (Hardikasari, 2011).

Kinerja perbankan memiliki hubungan erat dengan tingkat kesehatan bank. Pada surat edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP/2013, bank dituntut untuk melakukan penilaian tingkat kesehatan bank sendiri (*self-assessment*) menggunakan pendekatan Risiko (*Risk Based Bank Rating/RBBR*) baik secara individual maupun secara konsolidasi yang mencakup penilaian faktor *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum serta pedoman perhitungan selengkapnya diatur dalam surat edaran (SE) Bank Indonesia No.13/24pl/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum. Penilaian faktor *Good Corporate Governance* (GCG) dalam penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan menggunakan pendekatan risiko (RBBR) merupakan pengganti dari penilaian terhadap faktor Manajemen dalam penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum berdasarkan CAMELS rating.

2.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah meneliti tentang *corporate governance*. Hasil dari penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan, di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Sam'ani (2008)

Meneliti tentang pengaruh penerapan elemen-elemen *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2004-2007. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas komisaris, ukuran dewan direksi dan komite audit mempunyai hubungan positif signifikan terhadap kinerja perbankan. Kepemilikan institusional dan rasio leverage mempunyai hubungan negative dan signifikan terhadap kinerja perbankan. Tetapi komisaris independen secara signifikan tidak dapat mempengaruhi kinerja perbankan.

2. Irmala Sari (2010)

Meneliti tentang *corporate governance* pada kinerja perbankan yang diproksi dengan ROA. Indikator *corporate governance* yang digunakan yaitu Pemegang Saham Pengendali (*Large Shareholders*), Kepemilikan Asing (*Foreign Ownership*), Kepemilikan Pemerintah (*Government Ownership*), Ukuran Dewan direksi, Ukuran Dewan komisaris (*Board Size*), Komisaris Independen (*Board Independence*), CAR, Auditor Eksternal (*Big 4*), Ukuran Bank.

Hasil dari penelitian ini adalah Mekanisme Pemantauan Kepemilikan menunjukan hubungan yang tidak signifikan terhadap kinerja perbankan,

Mekanisme Pemantauan Pengendalian Internal menunjukan hubungan yang negatif signifikan terhadap kinerja perbankan kecuali hanya satu ukuran dewan direksi yang menunjukan hubungan yang positif namun tidak signifikan.

Mekanisme Pemantauan Regulator melalui persyaratan cadangan atau Rasio Kecukupan Modal (CAR) menunjukan hubungan yang positif signifikan terhadap kinerja perbankan dengan variabel kontrol ukuran bank yang diproksikan oleh total assets.

Mekanisme Pemantauan Pengungkapan melalui auditor eksternal (BIG 4) menunjukan hubungan yang positif signifikan terhadap kinerja perbankan, Mekanisme Pemantauan Tata Kelola Yang Baik masih menjadi masalah dalam rangka meningkatkan tujuan yang ingin dicapai oleh shareholders dan stakeholders.

3. Pratiwi (2012)

Meneliti tentang pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja perbankan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank konvensional yang berjumlah 18 bank. *Corporate governance* dalam penelitian ini diproksi oleh dewan komisaris, dewan direksi, komisaris independen dan kepemilikan institusional, sedangkan kinerja perbankan diproksi oleh ROA.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya dewan direksi yang mempunyai hubungan positif signifikan terhadap kinerja perbankan, sedangkan variabel lainnya yaitu dewan komisaris, komisaris independen dan

kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan.

4. Siagian (2013)

Meneliti tentang pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan perdagangan dan jasa tahun 2009-2011. Kinerja keuangan pada penelitian ini diproksi dengan ROE. Hasil dari penelitian ini adalah proporsi komisaris independen dan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROE. Hanya ukuran perusahaan yang memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan.

5. Noorizkie (2013)

Meneliti tentang pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2011. Kinerja keuangan perusahaan diproksi dengan ROA dan menggunakan sampel sebanyak 110 perusahaan.

Hasil dari penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris dan ukuran komisaris independen tidak berpengaruh signifikan walaupun memiliki pola hubungan yang positif. Ukuran komite audit dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan dan memiliki pola hubungan yang negatif. Sedangkan dewan direksi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kepemilikan institusional mempunyai pengaruh yang signifikan tetapi memiliki pola hubungan yang negatif.

6. Fanta, et al (2013)

Meneliti tentang *corporate governance* pada kinerja perbankan di Ethiopia dengan ketiadaan pasar modal. Kinerja perbankan diproksi dengan ROA dan ROE. *Corporate governance* pada penelitian ini menggunakan indikator ukuran dewan, komite audit, mekanisme tata kelola perusahaan eksternal, *current ratio*, CAR, LLP, dan LDR. Dengan menggunakan sampel dua bank milik pemerintah dan tujuh bank milik swasta memperoleh hasil bahwa *corporate governance* berpengaruh pada kinerja perbankan di Ethiopia.

7. Noviawan (2013)

Meneliti tentang pengaruh mekanisme *corporate governance* dan struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011. Kinerja keuangan diproksi dengan ROA dan penelitian ini tidak mempertimbangkan proses kerja yang dilakukan dewan komisaris, dewan direksi serta komite audit. Penelitian ini juga tidak mempertimbangkan kondisi lingkungan perusahaan.

Hasil dari penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Komisaris independen dan ukuran komite audit berpengaruh negative tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Ukuran dewan direksi dan kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.

Ringkasan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dan perbedaannya dirangkum dalam tabel 2.1 yang tersaji sebagai berikut:

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian-Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel	Hasil
1.	Sam'ani (2008)	Variabel independen: elemen-elemen <i>good corporate governance</i> Variabel dependen: kinerja keuangan perbankan.	aktivitas komisaris, ukuran dewan direksi dan komite audit mempunyai hubungan positif signifikan terhadap kinerja perbankan. Kepemilikan institusional dan rasio leverage mempunyai hubungan negative dan signifikan terhadap kinerja perbankan. Tetapi komisaris independen secara signifikan tidak dapat mempengaruhi kinerja perbankan.
2.	Irmala Sari (2010)	Variabel independen: <i>corporate governance</i> dengan indikator Pemegang Saham Pengendali (<i>Large Shareholders</i>), Kepemilikan Asing (<i>Foreign Ownership</i>), Kepemilikan Pemerintah (<i>Government Ownership</i>), Ukuran Dewan direksi,	Mekanisme Pemantauan Kepemilikan menunjukkan hubungan yang tidak signifikan terhadap kinerja perbankan. Mekanisme Pemantauan Pengendalian Internal menunjukkan hubungan yang negatif signifikan terhadap kinerja perbankan. Mekanisme Pemantauan

		<p>Ukuran Dewan komisaris (<i>Board Size</i>), Komisaris Independen (<i>Board Independence</i>), CAR, Auditor Eksternal (<i>Big 4</i>), Ukuran Bank</p> <p>Variabel dependen: kinerja perbankan (ROA)</p>	<p>Regulator melalui persyaratan cadangan atau Rasio Kecukupan Modal (CAR) menunjukkan hubungan yang positif signifikan terhadap kinerja perbankan.</p> <p>Mekanisme Pemantauan Pengungkapan melalui auditor eksternal (BIG 4) menunjukkan hubungan yang positif signifikan terhadap kinerja perbankan</p>
3.	Pratiwi (2012)	<p>Variabel independen: indikator <i>corporate governance</i> yaitu dewan direksi, dewan komisaris, komisaris independen dan kepemilikan institusional.</p> <p>Variabel dependen: kinerja perbankan (ROA)</p>	<p>dewan direksi yang mempunyai hubungan positif signifikan terhadap kinerja perbankan, sedangkan variabel lainnya yaitu dewan komisaris, komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan.</p>
4.	Siagian (2013)	<p>Variabel independen: <i>corporate governance</i> dengan indikator proporsi komisaris independen, komite audit dan ukuran</p>	<p>proporsi komisaris independen dan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan yang diukur</p>

		perusahaan. Variabel dependen: kinerja perusahaan perdagangan dan jasa (ROE)	dengan ROE. Hanya ukuran perusahaan yang memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan.
5.	Noorizkie (2013)	Variabel independen: ukuran dewan komisaris independen, ukuran komite audit, dewan direksi, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Variabel dependen: kinerja keuangan perusahaan manufaktur (ROA)	ukuran dewan komisaris dan ukuran komisaris independen tidak berpengaruh signifikan walaupun memiliki pola hubungan yang positif. Ukuran komite audit dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan dan memiliki pola hubungan yang negatif. Sedangkan dewan direksi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kepemilikan institusional mempunyai pengaruh yang signifikan tetapi memiliki pola hubungan yang negatif.
6.	Fanta, et al (2013)	Variabel independen: <i>Corporate governance</i> dengan indikator ukuran dewan, komite audit, mekanisme tata kelola perusahaan eksternal,	<i>corporate governance</i> berpengaruh pada kinerja perbankan di Ethiopia.

		<i>current ratio</i> , CAR, LLP, dan LDR. Variabel dependen: kinerja perbankan (ROA dan ROE)	
7.	Noviawan (2013)	Variabel independen: mekanisme <i>corporate governance</i> dan struktur kepemilikan Variabel dependen: kinerja keuangan (ROA)	ukuran dewan komisaris dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Komisaris independen dan ukuran komite audit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Ukuran dewan direksi dan kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.

Sumber: Data Sekunder yang Diolah

2.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah adanya indikator dalam suatu perusahaan perbankan yaitu ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan ukuran perusahaan yang mempunyai pengaruh terhadap baik atau tidaknya kinerja keuangan yang ada dalam suatu perusahaan perbankan. Dalam pengukuran kinerja keuangan tersebut menggunakan alat pengukuran yaitu CAR, NIM dan LDR. Kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan pada gambar 2.1 berikut :

Gambar 2.1

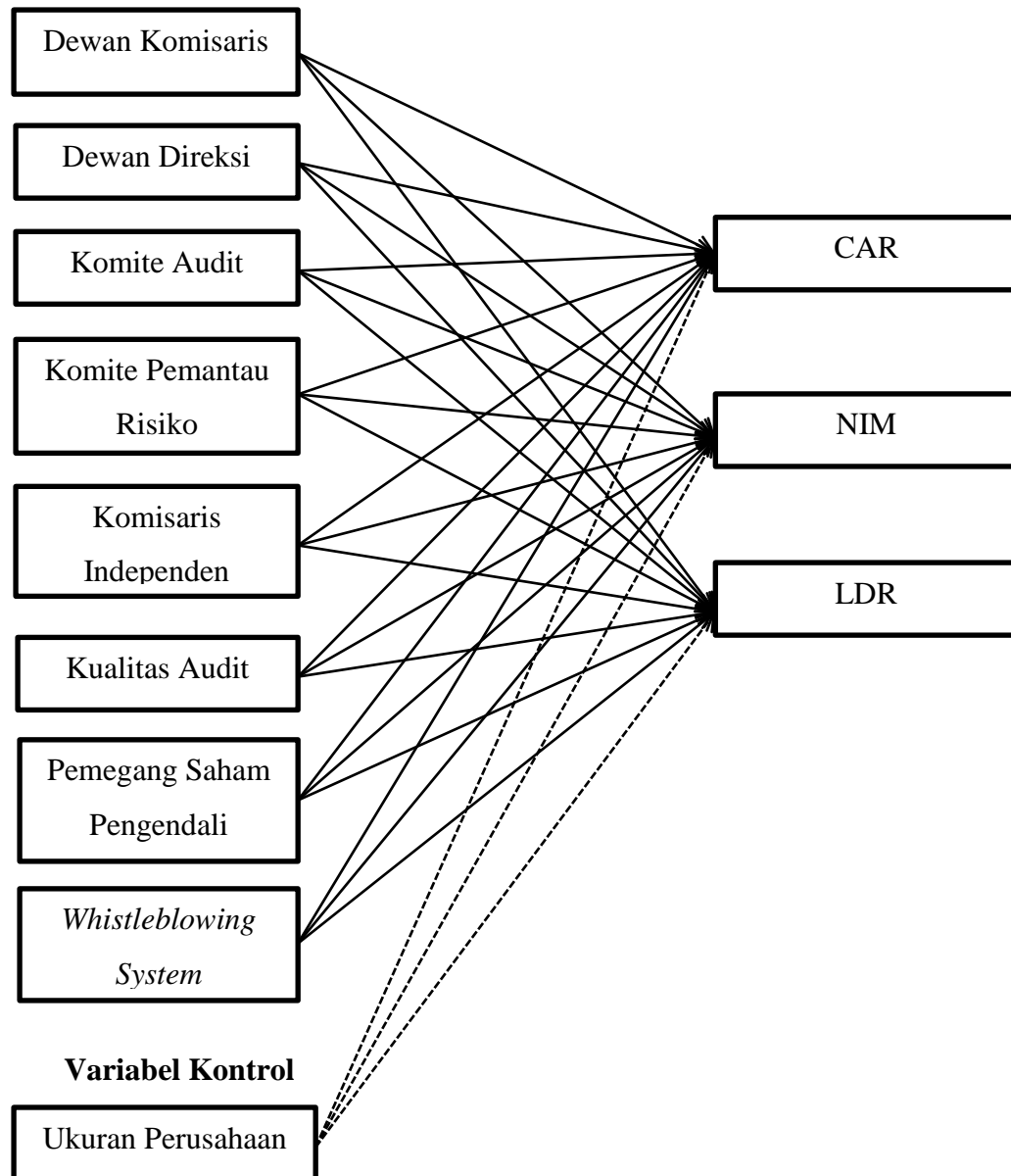
Model Kerangka Pemikiran Penelitian

Variabel Independen:

Variabel Dependen

Mekanisme *corporate governance*

Kinerja Keuangan



2.6 Perumusan Hipotesis

2.6.1 Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan Perbankan

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tahun 2013 menyebutkan Bank wajib melaksanakan prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang meliputi Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana. Dewan komisaris berfungsi untuk memonitor kinerja manajer dan memberikan nasehat kepada direksi serta memastikan perusahaan melakukan praktik *good corporate governance*. Keberadaan dewan komisaris diharapkan dapat meminimalisir benturan kepentingan antara dewan direksi dengan pemegang saham.

Penelitian mengenai dewan komisaris terhadap kinerja keuangan memiliki hasil yang beragam. Semakin besar ukuran dewan komisaris dapat berakibat pada makin buruk kinerja yang dimiliki perusahaan (Yermack 1996, Beasley 1996, Sundgren dan Wells 1998, Jensen 1993) dalam Hastuti (2011). Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa dengan adanya *agency problem*, yaitu semakin besar ukuran dewan komisaris maka akan mengalami kesulitan dalam menjalankan perannya, diantaranya kesulitan dalam berkomunikasi dan mengkoordinir kerja dari masing-masing anggota dewan itu sendiri, kesulitan dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan manajemen, serta kesulitan dalam mengambil keputusan (Yermack 1996, Jensen 1993) dalam Hastuti (2011). Sedangkan menurut Chtourou *et al* (2001) dalam Sari (2010) menyatakan bahwa dengan ukuran dewan yang semakin besar maka monitoring manajemen perusahaan akan semakin baik. Dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan adalah:

H1a: Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan (CAR)

H1b: Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan (NIM)

H1c: Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan (LDR)

2.6.2 Pengaruh Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan Perbankan

Dewan direksi berperan dalam menentukan kebijakan jangka pendek maupun jangka panjang perusahaan. Seberapa besar dewan direksi yang dibutuhkan oleh perusahaan juga masih menjadi pertanyaan. Semakin banyak anggota dewan direksi maka akan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, pengawasan dan pengambilan keputusan (Yermack 1996, Jensen 1993) dalam Hardikasari (2011). Eisenberg et al. (1998) menyatakan bahwa ada hubungan yang negatif antara ukuran dewan dengan kinerja perusahaan, dengan menggunakan sampel perusahaan di Finlandia. Sedangkan Dalton et al. (1999) menyatakan adanya hubungan positif antara ukuran dewan direksi dengan kinerja perusahaan. Rumusan hipotesis yang diajukan adalah:

H2a: Dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan (CAR)

H2b: Dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan (NIM)

H2c: Dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan (LDR)

2.6.3 Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Perbankan

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 menjelaskan bahwa tujuan Komite Audit adalah untuk membantu Dewan Komisaris atau dewan pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan internal. Sam'ani (2008) mengatakan bahwa komite audit mempunyai peran yang penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan. Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi kepengawasannya dengan melaksanakan kajian atas integritas laporan keuangan, manajemen risiko dan pengendalian internal. Selain itu, komite audit juga bertanggungjawab atas kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan hukum dan perundang-undangan. Dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan adalah:

H3a: Komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan (CAR)

H3b: Komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan (NIM)

H3c: Komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan (LDR)

2.6.4 Pengaruh Komite Pemantau Risiko terhadap Kinerja Keuangan Perbankan

Komite pemantau risiko dibentuk dalam rangka mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawab dewan komisaris. Komite pemantau risiko bertugas untuk melakukan pengawasan secara aktif atas pengelolaan risiko di perusahaan.

Pengawasan risiko yang buruk dapat mempengaruhi citra perusahaan. Maryatini (2006) menemukan bahwa struktur resiko keuangan dan perataan laba berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Rumusan hipotesis yang diajukan adalah:

H4a: Komite pemantau risiko berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan (CAR)

H4b: Komite pemantau risiko berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan (NIM)

H4c: Komite pemantau risiko berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan (LDR)

2.6.5 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan Perbankan

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Dalam pelaksanaan GCG, diperlukan keberadaan Komisaris Independen dan Pihak Independen untuk menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Bank, *check and balance*, serta melindungi kepentingan *stakeholders* khususnya pemilik dana dan pemegang saham minoritas (Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tahun 2013)

Penelitian mengenai dampak dari independensi dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan ternyata masih beragam. Penelitian yang menyatakan bahwa

tingginya proporsi dewan independen berhubungan positif dengan kinerja perusahaan (Yermack, 1996; Daily & Dalton, 1993; Streamns & Mizruchi, 1993) dalam Hastuti (2011). Sedangkan penelitian yang lain menyatakan dewan independen berhubungan negatif dengan kinerja (Baysinger, Kosnik & Turk, 1991; Goodstein & Boeker, 1991) dalam Hastuti (2011). Lastanti (2004) menyatakan bahwa independensi dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, namun belum berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan hipotesis yang diajukan adalah:

H5a: Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan (CAR)

H5b: Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan (NIM)

H5c: Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan (LDR)

2.6.6 Pengaruh Kualitas Audit Eksternal terhadap Kinerja Keuangan Perbankan

Auditor eksternal mempunyai peran yang penting dalam menciptakan nilai perusahaan dan pelaksanaan *good corporate governance* karena dianggap lebih independen dibandingkan dengan auditor internal. Salah satu fungsi utama auditor eksternal adalah menjamin berjalannya prosedur sebagaimana yang seharusnya (*compliance*) dan mencegah terjadinya transaksi keuangan dan kecurangan lain yang menyimpang (Arifin, 2005). Dalam melaksanakan tugasnya, auditor

eksternal membutuhkan catatan akuntansi dan data penunjang dari perusahaan klien guna memberikan pendapat atas kewajaran dan kesesuaian laporan keuangan perusahaan dengan standar akuntansi keuangan laporan keuangan klien. Auditor eksternal harus memberitahu perusahaan melalui komite audit mengenai kejadian dalam perusahaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (Tjager, 2008). Pada penelitian sebelumnya, seperti Lennox (2000) dalam Hastuti (2011) menyatakan bahwa teori reputasi memprediksi adanya hubungan positif antara ukuran KAP dengan kualitas audit KAP yang besar memiliki insentif yang lebih untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak reputasinya dibandingkan dengan KAP yang lebih kecil. Meutia (2004) menyimpulkan bahwa kantor akuntan publik yang lebih besar, kualitas audit yang dihasilkan juga lebih baik. Perusahaan yang memilih menggunakan KAP yang besar dinilai menjalankan fungsi pengawasan dan kontrol yang lebih baik dan dapat mendongkrak reputasi perusahaan sehingga investor tidak ragu untuk menanamkan modalnya. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H6: Kualitas audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan
(CAR)

H6: Kualitas audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan
(NIM)

H6: Kualitas audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan
(LDR)

2.6.7 Pengaruh Pemegang Saham Pengendali terhadap Kinerja Keuangan Perbankan

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tahun 2013, Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Umum. Termasuk dalam pengertian Pemegang Saham Pengendali Bank adalah pemegang saham Bank sampai dengan pengendali terakhir (*ultimate shareholders*) Bank. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disebut dengan PSP adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang:

- a. memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
- b. memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung (Peraturan Bank Indonesia No.13/ 27 /PBI/2011).

Penelitian mengenai pemegang saham pengendali pernah dilakukan oleh Shleifer dan Vishny (1986) dalam Lastanti (2004) menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara konsentrasi kepemilikan dengan nilai perusahaan, Pemegang saham pengendali (*large shareholders*) dapat mengurangi *freerider* yang merupakan masalah bagi investor kecil sehingga dapat

meningkatkan nilai perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H7a: Pemegang Saham Pengendali berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan (CAR)

H7b: Pemegang Saham Pengendali berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan (NIM)

H7c: Pemegang Saham Pengendali berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan (LDR)

2.6.8 Pengaruh *Whistleblowing System* terhadap Kinerja Keuangan Perbankan

Whistleblowing system (pengaduan pelanggaran) merupakan sarana komunikasi bagi pihak internal perusahaan untuk melaporkan perbuatan/perilaku/kejadian yang berhubungan dengan tindakan fraud, pelanggaran terhadap hukum, peraturan perusahaan, kode etik, dan benturan kepentingan yang dilakukan oleh pelaku di internal perusahaan. *Whistleblowing system* digunakan untuk mendeteksi dan mengungkap *wrongdoing* dan meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian *fraud* dan *Good Corporate Governance* yang terjadi di dalam sebuah organisasi. Di Indonesia sudah ada Pedoman Sistem Pelaporan dan Pelanggaran (SPP) atau *Whistleblowing System* (WBS) yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada 10 November 2008. Miceli dan Near (2002) menyatakan bahwa kebanyakan *whistleblower* pertama kali mengungkapkan penemuannya kepada internal perusahaan sebelum melaporkannya kepada publik. Penelitian yang

mengaitkan *whistleblowing* dengan akuntansi manajemen masih sedikit (Putri, 2012). Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H8a: *Whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan (CAR)

H8b: *Whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan (NIM)

H8c: *Whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan (LDR)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini melibatkan variabel yang terdiri dari delapan variabel bebas, tiga variabel terikat dan satu variabel kontrol. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, komite audit, komite pemantau risiko, komisaris independen, kualitas audit, pemegang saham pengendali, keberadaan *whistleblowing system*. Variabel dependennya adalah kinerja keuangan perbankan yang diukur dengan *Risk Based Bank Rating* (RBBR) melalui CAR, NIM dan LDR. Sedangkan ukuran bank menjadi variabel kontrolnya.

3.1.1 Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini meliputi :

1. Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran Dewan Komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris yang bertanggung jawab mengawasi perusahaan baik dari internal maupun eksternal perusahaan (Beiner et al, 2003).

Fungsi dari Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan, jalannya kebijakan pada umumnya baik mengenai bank maupun usaha dan memberikan nasehat kepada Direksi.

2. Ukuran Dewan Direksi

Ukuran dewan direksi diukur dengan menggunakan jumlah anggota dewan direksi dalam suatu perusahaan. Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 jumlah anggota dewan direksi dalam suatu perusahaan paling kurang 3 orang. Fungsi dari Direksi adalah mengelola dan bertanggung jawab terhadap jalannya operasional bank sehingga memerlukan pedoman sebagai wujud dari komitmen direksi dalam melaksanakan tugasnya.

3. Komite Audit

Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi kepengawasannya dengan melaksanakan kajian atas integritas laporan keuangan, manajemen risiko dan pengendalian internal. Selain itu, komite audit juga bertanggungjawab atas kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan hukum dan perundang-undangan. Komite audit diukur dengan jumlah komite audit di dalam perusahaan.

4. Komite Pemantau Risiko

Komite pemantau risiko dibentuk dalam rangka mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawab dewan komisaris. Komite Pemantau Risiko diukur dengan jumlah komite pemantau risiko di dalam perusahaan.

5. Komisaris Independen

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Komisaris Independen diukur

dengan presentase komisaris independen terhadap jumlah dewan komisaris di dalam perusahaan.

6. Kualitas Audit

Fungsi utama auditor eksternal adalah menjamin berjalannya prosedur sebagaimana yang seharusnya (*compliance*) dan mencegah terjadinya transaksi keuangan dan kecurangan lain yang menyimpang (Arifin, 2005). Kualitas audit diukur dengan variabel dummy. Jika perusahaan menggunakan auditor *big four* maka dinilai 1. Sebaliknya, jika selain *big four* dinilai 0.

7. Pemegang Saham Pengendali

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tahun 2013, Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Umum. Termasuk dalam pengertian Pemegang Saham Pengendali Bank adalah pemegang saham Bank sampai dengan pengendali terakhir (*ultimate shareholders*) Bank. Pemegang saham pengendali diukur dengan variabel dummy. Jika ada pemegang saham pengendali di dalam perusahaan dinilai 1. Sebaliknya jika tidak ada pemegang saham pengendali maka dinilai 0.

8. Keberadaan *Whistleblowing System*

Whistleblowing system (pengaduan pelanggaran) merupakan sarana komunikasi bagi pihak internal perusahaan untuk melaporkan perbuatan/perilaku/kejadian yang berhubungan dengan tindakan fraud, pelanggaran terhadap hukum, peraturan perusahaan, kode etik, dan benturan

kepentingan yang dilakukan oleh pelaku di internal perusahaan. Jika ada *Whistleblowing System* di dalam perusahaan dinilai 1. Sebaliknya jika tidak ada *Whistleblowing System* maka dinilai 0.

3.1.2 Variabel Dependen

Penelitian ini mencoba menganalisis hubungan antara *corporate governance* dengan kinerja keuangan perbankan yang diproksi dengan *Risk Based Bank Rating* (RBBR) melalui CAR, NIM, dan LDR

1. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Rasio ini digunakan untuk mengukur proporsi modal sendiri dibandingkan dengan dana luar didalam pembiayaan kegiatan usaha perbankan. Pada dasarnya CAR menunjukkan pemenuhan modal yang merupakan landasan bank untuk mengembangkan kegiatan usahanya. Semakin besar rasio tersebut, maka semakin baik posisi modal sebuah bank. CAR dihitung melalui rumus :

$$CAR = \frac{\text{modal bank}}{\text{aktiva tertimbang menurut resiko}} \times 100\%$$

2. *Net Interest Margin* (NIM)

NIM disebut juga sebagai rentabilitas ekonomi merupakan perbandingan antara pendapatan bunga bersih dengan rata-rata aktiva produktif yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut (PBI No. 13/1/PBI/2011). NIM dihitung melalui rumus:

$$NIM = \frac{\text{Pendapatan bunga bersih}}{\text{Rata-rata total aset produktif}} \times 100\%$$

3. *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Loan to Deposit Ratio (LDR) untuk mengukur posisi atau kemampuan likuiditas bank. Rasio ini menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. LDR dihitung dengan rumus:

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Total dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

3.1.3 Variabel Kontrol

Variabel kontrol dalam penelitian ini yaitu ukuran bank yang diproksi dengan logaritma natural total asset bank pada akhir tahun.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan elemen yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Pembangunan Daerah di Indonesia selama periode 2010-2013. Pemilihan rentang waktu 2010-2013 merupakan data yang paling *up to date* dan diharapkan penelitian berfokus pada rentang waktu tersebut secara maksimal. Sampel merupakan bagian dari populasi. Adapun teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* untuk mendapatkan sampel yang representative dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut:

1. Bank mempublikasikan laporan tahunan (*annual report*) untuk periode 31 Desember 2010-2013

2. Bank mengungkapkan informasi secara lengkap mengenai *corporate governance*, struktur kepemilikan, rasio keuangan, dan auditor eksternal dalam laporan tahunannya.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif yang menekankan hasil analisis berupa angka-angka yang diolah dengan metode statistika tertentu. Sumber data penelitian ini didapatkan dari laporan keuangan perbankan (*annual report*) tahun 2010-2013, website Bank Indonesia, website asbenda serta dari website masing-masing sampel.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah metode dokumenter yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari catatan-catatan atau dokumen perusahaan (data sekunder) serta studi pustaka dari berbagai literatur dan sumber- sumber lainnya yang berhubungan dengan *good corporate governance*.

3.5 Metode Analisis

Analisis data digunakan untuk mendapatkan informasi yang relevan yang terkandung dalam data tersebut dan menggunakan hasil analisisnya untuk memecahkan suatu masalah (Ghozali, 2011). Hal ini disebabkan data yang diperoleh dari penelitian tidak dapat digunakan secara langsung tetapi perlu diolah agar data tersebut dapat memberikan keterangan yang dapat dipahami, jelas, dan teliti. Pada penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah :

3.5.1 Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan variabel-variabel dalam penelitian, yang mencakup nilai rata-rata, maksimum, minimum dan standar deviasi. Lebih lanjut, analisis deskriptif ini tidak bertujuan untuk pengujian hipotesis (Azwar, 1998 dalam Hastuti, 2011).

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menggunakan pengujian regresi linier berganda. Dalam Ghozali (2011), regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat tersebut adalah data harus terdistribusi secara normal, tidak mengandung multikolonieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik terdiri dari:

3.5.2.1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2011) uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal.

Pengujian normalitas dalam penelitian ini dapat menggunakan *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonal.

Uji normalitas grafik dapat menyesatkan jika tidak berhati-hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik belum tentu normal. Oleh karena itu dilakukan pengujian statistik dengan cara melakukan uji *one sample tes Kolmogrov-Smirnov* (Ghozali, 2011). Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S). Jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2011).

3.5.2.2. Uji Multikolonieritas

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi, salah satunya dapat dilakukan dengan :

- 1) Menganalisis matriks korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas.
- 2) Multikolinieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai *tolerance* dan lawannya (2) *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai $Tolerance < 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF > 10$.

3.5.2.3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan

pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya (Ghozali, 2011).

Uji Autokorelasi dapat dilakukan dengan Uji Durbin-Watson (*DW test*) dan *Run Test*. *DW Test* digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variable lag diantara variabel independen (Ghozali, 2011).

Menurut Ghozali (2011), aturan pengujian autokorelasi terdapat dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pengambilan keputusan autokorelasi

Jika	Keputusan	Hipotesis Nol
$0 < d < dl$	Tolak	Tidak ada autokorelasi positif
$dl < d < du$	<i>No Decision</i>	Tidak ada autokorelasi positif
$4 - dl < d < 4$	Tolak	Tidak ada korelasi negatif
$4 - du < d < 4 - dl$	<i>No Decision</i>	Tidak ada korelasi negatif
$du < d < 4 - du$	Tidak Ditolak	Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif

Sumber: Ghozali I, "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS19", 2011

Sedangkan *Run Test* merupakan pengujian statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika

antar residual tidak terdapat korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Jika probabilitas hasil signifikan pada 0,05 maka residual tidak random atau terjadi autokorelasi antar residual.

3.5.2.4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, salah satu caranya adalah dengan melihat grafik *scatterplot* dan Uji Park. *Scatterplot* memiliki dasar analisis jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y , maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

Analisis menggunakan grafik plot memiliki kelemahan yang cukup signifikan karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil plotting (Ghozali, 2011). Maka dari itu dilakukan pengujian dengan uji park yang lebih terjamin keakuratan hasilnya. Jika koefisien parameter beta dari persamaan regresi signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat heteroskedastisitas dan sebaliknya jika parameter beta

tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homokedastisitas tidak dapat ditolak (Ghozali, 2011).

3.5.3. Regresi Linier Berganda

Alat analisis yang digunakan adalah model regresi berganda linier untuk melihat pengaruh antara variabel dependen dengan variabel indepenen. Data diolah dengan bantuan *software* SPSS. Persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

Model 1

$$\text{CAR} = \alpha + \beta_1\text{DEKOM} + \beta_2\text{DEDIR} + \beta_3\text{KOMAUD} + \beta_4\text{KOMRISK} + \beta_5\text{KOMIND} + \beta_6\text{KUAUD} + \beta_7\text{PSP} + \beta_8\text{WBLOW} + \beta_9\text{SIZE} + \varepsilon$$

Model 2 :

$$\text{NIM} = \alpha + \beta_1\text{DEKOM} + \beta_2\text{DEDIR} + \beta_3\text{KOMAUD} + \beta_4\text{KOMRISK} + \beta_5\text{KOMIND} + \beta_6\text{KUAUD} + \beta_7\text{PSP} + \beta_8\text{WBLOW} + \beta_9\text{SIZE} + \varepsilon$$

Model 3 :

$$\text{LDR} = \alpha + \beta_1\text{DEKOM} + \beta_2\text{DEDIR} + \beta_3\text{KOMAUD} + \beta_4\text{KOMRISK} + \beta_5\text{KOMIND} + \beta_6\text{KUAUD} + \beta_7\text{PSP} + \beta_8\text{WBLOW} + \beta_9\text{SIZE} + \varepsilon$$

3.5.4. Pengujian Hipotesis

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *Goodness of Fitnya*. Secara statistik, hal tersebut dapat diukur dengan nilai statistik t, nilai statistik F, dan koefisien determinasi. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis

(daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima (Ghozali, 2011).

3.5.4.1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Uji statistik t ini digunakan karena untuk memperoleh keyakinan tentang kebaikan dari model regresi dalam memprediksi.

Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Apabila nilai t hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel maka berarti t hitung tersebut signifikan artinya hipotesis alternatif diterima yaitu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan melihat *p-value* dari masing-masing variabel. Hipotesis diterima apabila $p\text{-value} < 5\%$ (Ghozali, 2011).

3.5.4.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel.

3.5.4.3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) bertujuan untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan antara variabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinan determinasi (*adjusted R-square*). Nilai *R-Square* yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan

variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu artinya variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variabel dependen (Ghozali,2011).